

THE INFLUENCE OF REGIONAL INDEPENDENCE RATIO AND REGIONAL EXPENDITURE ON REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE (EMPIRICAL STUDY ON REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2019-2023)

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023)

Arum Hidayatuzzahroh¹, Gregorius Anggana Lisiantara²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang^{1,2}

arumhidayatuzzahroh7008@mhs.unisbank.ac.id¹, greganggana@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRACT

This research intends to analyze the effect of independence ratio and regional expenditure on local government financial performance in Central Java Province. The data used is the Budget Realization Report from 35 Regencies/Cities in Central Java during the 2019-2023 period. The research uses a purposive sampling method with a total of 175 observations. Data analysis implemented in this study includes Descriptive Analysis, Panel data regression, Classical Assumption Test, Model Feasibility Test, and Hypothesis Testing. The results show that the independence ratio has no significant effect on local government financial performance. This indicates that regional dependence on central transfer funds remains high. Meanwhile, regional expenditure has a significant positive effect on local government financial performance. Simultaneously, both independent variables can only explain 5.7% of the variation in local government financial performance, while 93.3% is explained by other variables outside the research model. This study suggests the need for optimization of local revenue and more effective management of regional expenditure to improve local government financial performance.

Keywords: *Independence Ratio, Regional Expenditure, Local Government Financial Performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2019-2023. Penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan total 175 observasi. Analisis data diimplementasikan dalam penelitian ini mencakup Analisis Deskriptif, Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Sementara itu, belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan, kedua variabel independen hanya mampu menjelaskan 5.7% variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan 93.3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Penelitian ini menyarankan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur sendiri daerahnya dengan membagi wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berlandaskan pada prinsip desentralisasi, yang menjadi

dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan otoritas kepada pemerintah daerah (Putri & Munandar, 2021). APBD adalah representasi dari sejumlah program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam jangka waktu tertentu, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Pemda dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan Pemda melakukan

pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam APBD, yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung menunjukkan kapasitas Pemda dalam mendanai realisasi sejumlah tugas pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial kepada masyarakat (Awani & Hariani, 2021). Lalu, untuk menilai kapabilitas keuangan suatu wilayah, dapat dilaksanakan analisis rasio keuangan pada APBD yang sudah ditentukan dan dilaksanakan (Halim & Kusufi, 2007).

Perhitungan rasio untuk menilai kapabilitas keuangan daerah berfungsi untuk mencerminkan kinerja Pemda. Pengukuran kinerja adalah aspek penting pada proses mengendalikan manajemen, baik di organisasi publik ataupun swasta (Awani & Hariani, 2021). Kinerja keuangan Pemda yang rendah menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal untuk merencanakan dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Firmansyah, 2023).

Rendahnya kontribusi PAD pada total penerimaan daerah menyebabkan tingginya ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat (Surgawati, 2021). Di tahun 2021, di Provinsi Jawa Tengah hanya Kota Semarang yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Sementara itu, sejumlah 21 atau 60% dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mempunyai tingkat ketergantungan keuangan yang sedang, dan 13 atau 37,14% lainnya mempunyai level ketergantungan yang tinggi (Prasetyo et al., 2021). Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan fundamental kepada masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, Pemda turut perlu merumuskan sumber-sumber pendapatan daerah supaya tidak bergantung pada dana transfer dari

pemerintah pusat. Maka, penting untuk melakukan analisis yang lebih detail pada kinerja keuangan Pemda (Firmansyah, 2023).

Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan Pemda berperan sebagai agen, sementara masyarakat menjadi prinsipal. Pemda berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berperan sebagai landasan dalam mengevaluasi kinerja keuangan mereka. Kinerja keuangan daerah ini menggambarkan sejauh mana pencapaian tujuan kegiatan keuangan yang telah ditetapkan, yang diukur berdasarkan indikator keuangan yang tercermin dalam laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Melalui penilaian kinerja keuangan pemerintah yang didasarkan pada laporan keuangan, masyarakat dapat mengakses informasi yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Marliani, 2022).

Analisis rasio keuangan pada APBD yang sudah ditentukan dan diadakan berfungsi sebagai metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan (Angin et al., 2023). Beberapa peneliti membuktikan bahwa rasio kemandirian menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan Pemda (Amalia et al., 2024; Anyda, 2020; Ijtihad & Harsono, 2023; Permatasari & Trisnarningsih, 2022). Kendati demikian penelitian lain menemukan bahwasanya rasio kemandirian menimbulkan pengaruh negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah (L. Hakiki, 2018; Ijtihad & Harsono, 2023). Sementara penelitian lain menunjukkan bahwasanya rasio kemandirian, efektivitas PAD, dan belanja daerah secara simultan menimbulkan pengaruh

positif pada kinerja keuangan Pemda (Mayanti et al., 2023)

Belanja daerah bertujuan dalam rangka menaikkan tingkat dan melindungi kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, serta program untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Tingginya belanja Pemda seharusnya merepresentasikan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin baik angka pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pula skor kinerja Pemda tersebut (Fitri, 2018). Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya belanja daerah menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan Pemda (Armaja et al., 2017; D. Hakiki et al., 2023; Ijtihad & Harsono, 2023; Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Sementara penelitian yang lain mengindikasikan bahwasanya belanja daerah menimbulkan pengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah (Mayanti et al., 2023; Saputri & Kurnia, 2020).

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menyelidiki secara empiris pengaruh rasio kemandirian serta alokasi belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini harapannya memiliki kontribusi signifikan pada pengembangan literatur yang membahas evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna untuk analisis kinerja keuangan Pemda pada masa depan, baik untuk Indonesia maupun negara lain yang memiliki sistem desentralisasi yang serupa. Di samping itu, penelitian ini juga harapannya dapat memberikan masukan yang memberikan manfaat bagi Kementerian Dalam Negeri dalam

rangka memperbaiki kebijakan pengawasan dan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah.

Teori Keagenan

Keagenan adalah bentuk kesepakatan antara pihak prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada agen guna membuat keputusan tertentu (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan pada prinsipnya telah diimplementasikan pada struktur organisasi sektor publik, terutama di lingkup Pemda. Perspektif teori ini menganggap bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang bertindak atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, agen diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, karena mereka menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab yang diemban dan yakin bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan kewajiban tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Ardelia et al., 2022).

Di antara beberapa masalah yang sering timbul pada teori keagenan yaitu asimetri informasi, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi internal dibandingkan masyarakat. Pemda bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan keuangan pada publik. Namun, terkadang pemerintah daerah tidak dapat menyajikan laporan finansial dengan lengkap dan konsisten karena adanya motif tertentu, yang menyebabkan asimetri informasi. Untuk mencegah kecurangan oleh agen, akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dinilai dengan cara berkala yang menjadi cara untuk mengendalikan dan memastikan pengelolaan keuangan daerah selaras dengan aturan yang diberlakukan (Nauw & Riharjo, 2021).

Teori keagenan juga menguraikan bahwasanya agen, cenderung bertindak oportunistik dan menghindari risiko. Pemerintah daerah tidak sebatas bertanggung jawab menyediakan laporan finansial yang akurat dan lengkap, melainkan juga memfasilitasi akses informasi kepada masyarakat. Untuk menghindari risiko ketidakpercayaan dari pemangku kepentingan, pemerintah daerah berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya dan bertanggung jawab akan pengelolaan keuangan daerah (Aryani, 2022).

Dalam penelitian ini, Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Kinerja keuangan menjadi indikator keberhasilan agen dalam mengelola kepentingan prinsipal, dimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat menurunkan asimetri informasi antara kedua pihak.

Kinerja Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwasanya kinerja merupakan keluaran ataupun hasil dari aktivitas ataupun program yang hendak ataupun sudah dicapai berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dengan kuantitas serta kualitas terukur.

Kinerja keuangan memiliki fungsi untuk menganalisis dan menilai seberapa jauh suatu organisasi atau badan usaha dapat melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mematuhi aturan pelaksanaan keuangan secara tepat dan akurat (Santoso et al., 2021). Pengukuran kinerja keuangan Pemda

dilakukan dengan tiga tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja pemerintahan, (2) mendukung alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, serta (3) merealisasikan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi antar lembaga.

Penilaian terhadap kinerja keuangan merujuk pada suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai suatu entitas dengan memanfaatkan indikator yang terukur secara kuantitatif. Di antara beberapa metode yang dipergunakan yaitu analisis rasio keuangan daerah, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memperhitungkan seberapa jauh pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sumber daya keuangan lokal. Lebih dari sekadar menunjukkan bagaimana dana publik dialokasikan, analisis ini juga memberikan gambaran mengenai penggunaan dana yang diatur sedemikian rupa agar tercapai efisiensi, ekonomi, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaannya (Angin et al., 2023). Rasio efisiensi berperan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan serta memajukan perekonomian daerah tersebut. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat dianggap efisien apabila tercermin pada rasio yang optimal. Jika hasil rasio efisiensi berada di bawah angka satu atau kurang dari 100%, maka kinerja yang ditunjukkan bisa dikategorikan efisien. Maka, kesimpulannya adalah semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah. (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah merepresentasikan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri. Hal ini sejalan dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, yang pendanaannya bersumber dari pajak serta retribusi dari masyarakat sebagai kontributor utama pendapatan daerah (Putri & Munandar, 2021). Semakin besar nilai rasio ini, semakin rendah tingkat ketergantungan suatu daerah pada sumber daya eksternal, dan sebaliknya. Kemandirian finansial daerah akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan; rasio yang lebih tinggi menunjukkan kontribusi masyarakat yang lebih besar dalam hal pembayaran pajak dan retribusi, yang menjadi sumber utama pendapatan daerah. Lebih lanjut, tingkat pembayaran pajak dan retribusi dapat dijadikan indikator untuk memperhitungkan seberapa jauh kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Angin et al., 2023). Rasio kemandirian keuangan daerah diukur melalui perbandingan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh melalui transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah (Mahmudi, 2016).

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada kurun tahun anggaran berkenaan. Pengalokasian belanja sesuai dengan kebutuhan daerah, dan seluruh pengeluaran disusun dalam APBD

dengan mempertimbangkan program serta prioritas pembangunan daerah (D. Hakiki et al., 2023)

Pengeluaran daerah merupakan bentuk kewajiban yang harus terpenuhi oleh Pemda dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab. Besarnya pengeluaran yang dialokasikan berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang diberikan. Seiring dengan peningkatan kualitas layanan tersebut, kebutuhan akan dana operasional pun meningkat, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi krusial guna memastikan kelancaran serta keberlanjutan berbagai program pembangunan di tingkat daerah (Salsabilla & Rahayu, 2021) belanja setiap pemerintah daerah bervariasi (Kusuma, 2017)

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio kemandirian daerah memiliki dampak pada kinerja keuangan daerah, yang berarti bahwa tingkat tinggi atau rendahnya rasio tersebut memengaruhi kinerja keuangan (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Rasio kemandirian daerah mencerminkan sejauh mana kontribusi masyarakat dalam membayarkan pajak serta retribusi daerah. Semakin sejahtera masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi, semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Dengan kemandirian keuangan daerah, Pemda dapat melakukan pembiayaan konstruksi wilayahnya dan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemandirian keuangan yang tinggi merepresentasikan kinerja keuangan daerah berada dalam kondisi yang baik (Ijtihad & Harsono, 2023).

Beberapa penelitian membuktikan bahwasanya rasio kemandirian menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan Pemda (Amalia et al., 2024; Anyda, 2020; Ijtihad & Harsono, 2023; Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Berdasarkan logika pemikiran dan bukti empiris yang sudah diuraikan di atas, diurmuskan hipotesis berikut ini. **H1:** Rasio kemandirian menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah

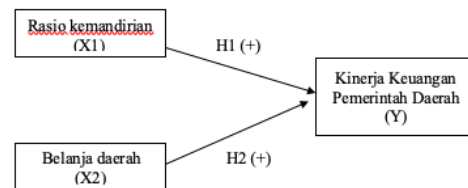
Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Alokasi belanja yang tepat sangat penting dalam meraih stabilitas dan tumbuhnya perekonomian daerah tertentu. Di sisi lain, belanja turut berfungsi sebagai informasi teruntuk masyarakat terkait dengan realisasi konstruksi, serta memiliki peran menjadi alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Belanja daerah menimbulkan pengaruh pada kinerja keuangan Pemda, besarnya belanja yang dirilis oleh suatu daerah dapat memudahkan pemerintah pada realisasi sejumlah program konstruksi yang sudah dirancang (Saputri & Kurnia, 2020). Pengelolaan belanja daerah secara efisien serta tepat sasaran akan menaikkan tingkat kinerja keuangan Pemda (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Ini menjadi indikasi bahwasanya anggaran belanja pemerintah daerah sudah digunakan dengan efektif untuk menaikkan tingkat kinerja (Kusuma, 2017). Beberapa penelitian membuktikan bahwasanya belanja daerah menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan Pemda (Amalia et al., 2024; Anyda, 2020; Armaja et al., 2017; D. Hakiki et al., 2023; Ijtihad & Harsono, 2023; Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

H2: Belanja daerah menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah

Kerangka Penelitian

Model penelitian yang dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan standarisasi Pemerintah daerah memiliki data lengkap yang dibutuhkan yaitu Laporan Realisasi APD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2019 – 2023 yang telah diaudit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh data sebanyak 35 (Kabupaten/Kota) x 5 (tahun) x 2 (variabel), sehingga total sampel yang diperoleh adalah 350. Sejumlah teknik analisis yang diimplementasikan dalam penelitian ini mencakup Analisis Deskriptif, Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model, dan Uji Hipotesis.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan berfungsi untuk menganalisis dan menilai sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan dapat melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mematuhi aturan pelaksanaan keuangan secara tepat dan akurat.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mencerminkan kapabilitas Pemda untuk pembiayaan aktivitas pemerintahan serta pembangunan secara mandiri, berdasarkan target yang sudah ditentukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak serta retribusi yang menjadi sumber penghasilan daerah.

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Pinjaman}} \times 100\%$$

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah keseluruhan kewajiban Pemda yang diakui menurunkan nilai kekayaan bersih pada kurun waktu tahun anggaran berkaitan.

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Ln Total Realisasi Belanja Daerah}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan analisis, deskripsi, dan gambaran umum tentang data variabel. Statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup nilai minimum dan maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi dari variabel dependen yang berupa kinerja keuangan Pemda, serta variabel independen yang meliputi rasio kemandirian dan belanja daerah.

Menurut hasil statistic deskriptif dalam tabel 4.2 terdapat 175 data observasi yang dipergunakan untuk sampel penelitian. Dibawah ini merupakan analisis deskriptif dari hasil tersebut :

Tabel 1. 1 Hasil Uji Analisis Deskriptif

	RK	BD	KKD
Mean	0.262419	28.39110	0.942121
Median	0.233648	28.41260	0.981570
Maximum	1.126078	29.30633	1.087449
Minimum	0.052200	27.56068	0.158577
Std. Dev.	0.140561	0.302734	0.132283
Skewness	3.453790	-0.510036	-1.590102
Kurtosis	19.78640	4.362809	8.887255

Jarque-Bera	2402.589	21.12976	326.4732
Probability	0.000000	0.000026	0.000000

Sum	45.92336	4968.442	164.8711
Sum Sq. Dev.	3.437774	15.94677	3.044812

Observations	175	175	175
--------------	-----	-----	-----

Catatan : Rasio Kemandirian (RK), Belanja Daerah (BD), Kinerja Keuangan Daerah (KKD)

Menurut hasil statistik deskriptif dalam tabel 1.1 erdapat 175 data observasi yang dipergunakan untuk sampel penelitian. Dibawah ini merupakan analisis deskriptif dari hasil tersebut :

1. Variabel independen rasio kemandirian mempunyai nilai maximum sejumlah 1.126078 pada Kota Semarang rentang waktu 2023 dan nilai minimum sejumlah 0.052200 pada Kota Tegal periode 2023. Kemudian angka rata rata sejumlah 0.262419 yang mengindikasikan rasio kemandirian yang rendah. Adapun nilai median sejumlah 0.233648 dan nilai standar deviasi sejumlah 0.140561.
2. Variabel independen belanja daerah mempunyai nilai maximum sejumlah 29.30633 yaitu pada Kota Magelang periode 2023 serta nilai minimum sejumlah 27.56068 yaitu pada Kabupaten Karanganyar periode 2029. Kemudian nilai rata – rata sejumlah 28.39110. Untuk nilai median sebesar 28.41260 dan nilai standar deviasi sejumlah 0.302734.
3. Variabel dependen kinerja keuangan Pemda memiliki nilai maximum sejumlah 1.087449 yaitu pada Kota Magelang periode 2019 serta nilai minimum sejumlah 0.158577 pada Kota Surakarta periode 2021. Nilai rata – rata untuk variabel kinerja keuangan Pemda sejumlah 0.942121. Kemudian nilai median sebesar 0.981570 dan nilai standar deviasi sejumlah 0.132283.

Regresi Data Panel**Tabel 1. 2 Hasil Uji Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/02/25 Time: 14:59				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KKD	-1.612155	0.918359	-1.755473	0.0810
RK	0.114899	0.069686	1.648817	0.1010
BD	0.088905	0.032355	2.747787	0.0066

Sesuai dengan hasil dari regresi data panel menggunakan CEM yang ditunjukkan tabel 1.2 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKD = -1.612155 + 0.114899RK + 0.088905BD + e$$

Analisis dari rumus regresi tersebut seperti berikut :

Nilai Konstanta

Nilai ini mengindikasikan bahwasanya jika kedua variabel Rasio Kemandirian dan Belanja Daerah bernilai nol, maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diprediksi sebesar -1.612155.

Rasio Kemandirian (RK)

Nilai koefisien sebesar 0.114899 mengindikasikan bahwasanya masing-masing peningkatan sebesar satu satuan pada variabel Rasio Kemandirian akan meningkatkan nilai Kinerja Keuangan Pemda sejumlah 0.114899, dengan asumsi variabel Belanja Daerah tetap. Ini mengindikasikan adanya relasi positif antara rasio kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

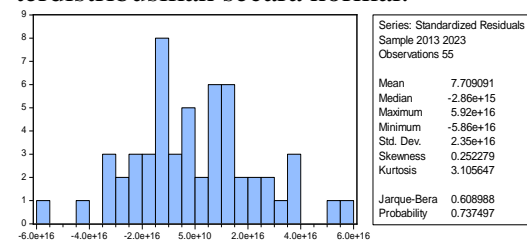
Belanja Daerah (BD)

Nilai koefisien sebesar 0.088905 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel belanja daerah akan meningkatkan nilai

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.088905, dengan asumsi variabel Rasio Kemandirian tetap konstan. Ini juga menunjukkan adanya hubungan positif antara belanja daerah dan kinerja keuangan.

Uji Normalitas

Uji ini mempunyai tujuan dalam rangka mengidentifikasi apakah variabel-variabel pada model regresi panel mengikuti distribusi normal. Sebuah model regresi yang baik seharusnya mempunyai data yang terdistribusi normal ataupun mendekati normal. Apabila angka probabilitas Jarque-Bera >0.05 maka data terdistribusikan secara normal, sementara jika probabilitas Jarque-Bera <0.05 dinyatakan data tidak terdistribusikan secara normal.

**Gambar 1. 2 Hasil Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas dalam gambar 1.2 menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0.608 yang berarti memiliki nilai di atas tingkat signifikasi >0.05 . Maka, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusikan dengan normal.

Uji Autokorelasi**Tabel 1. 3 Hasil Uji Autokorelasi**

Dependent Variable: REABS				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/02/25 Time: 13:37				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KKD	2.641988	0.509311	5.187381	0.0000
RK	-0.034385	0.038647	-0.88973	0.3749
BD	-0.089113	0.017944	-4.96620	0.2761

R-squared	0.130007	Mean dependent var	0.102957
Adjusted R-squared	0.119891	S. D. dependent var	0.076355
S.E. of regression	0.071632	Akaike info criterion	-2.417569
Sum squared resid	0.882545	Schwarz criterion	-2.363316
Log likelihood	214.5373	Hannan-Quinn criter.	-2.395562
F-statistic	12.85139	Durbin-Watson stat	1.731106
Prob(F-statistic)	0.000006		

Merujuk pada tabel Distribusi Durbin-Watson yang ditampilkan pada ilustrasi sebelumnya, dengan parameter ((k'; N) = (2; 175)), didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1,7296 dan batas atas (dU) sebesar 1,7758. Sementara itu, nilai statistik Durbin-Watson (d) yang dihasilkan oleh model regresi adalah 1,731106. Dengan demikian, nilai Durbin-Watson (d) terletak di antara batas bawah dan batas atas, yakni ($dL < d < dU$) atau ($1,7296 < 1,7311 < 1,7758$). Merujuk pada aturan pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson, apabila nilai (d) berada dalam rentang antara (dL) dan (dU), atau dalam selang komplementernya, yaitu antara ($4 - dU$) dan ($4 - dL$), maka hasil pengujian tidak memberikan kesimpulan yang definitif. Maka, kesimpulannya adalah tidak ada indikasi kuat mengenai adanya autokorelasi dalam model yang dianalisis.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

X1	1.000000	0.026085
X2	0.026085	1.000000

Hasil uji multikolinearitas mengindikasikan bahwasanya tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel tidak terikat, dengan nilai korelasi yang tidak lebih dari 0,90, maka kesimpulannya adalah tidak ditemukan multikolinearitas di antara variabel tidak terikat.

Uji Heteroskedastisitas.

Tabel 1. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: REABS
Method: Panel Least Squares
Date: 02/02/25 Time: 13:37
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KKD	2.641988	0.509311	5.187381	0.0000
RK	-0.034385	0.038647	-0.889736	0.3749
BD	-0.089113	0.017944	-4.966201	0.2761

Hasil uji penelitian ini nilai yang didapat untuk Rasio Kemandirian sebesar $0.3749 > 0.05$ dan Belanja Daerah sebesar $0.2761 > 0.05$ sehingga tidak terdapatnya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 1. 6 Hasil Uji F, Hasil Uji T, dan Hasil Uji R

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 02/02/25 Time: 14:20
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.612155	0.918359	-1.755473	0.0810
X1	0.114899	0.069686	1.648817	0.1010
X2	0.088905	0.032355	2.747787	0.0066

R-squared	0.057599	Mean dependent var	0.942121
Adjusted R-squared	0.046640	S.D. dependent var	0.132283
S.E. of regression	0.129162	Akaike info criterion	-1.238508
Sum squared resid	2.869435	Schwarz criterion	-1.184254
Log likelihood	111.3694	Hannan-Quinn criter.	-1.216501
F-statistic	5.256224	Durbin-Watson stat	1.084046
Prob(F-statistic)	0.006085		

Hasil Uji R

Nilai R-squared yang di dapat melalui pengujian sebesar 0.057599. Dengan demikian, besar nilai Pengujian 0.057599 variasi variabel KKD dapat dijelaskan dengan variable RK dan BD. Dapat di simpulkan pengaruh dari RK dan BD sebesar 5.7% yang dimana

93.3% lain mendapat dampak dari variabel lain yang tidak dapat di jelaskan di penelitian.

Hasil Uji F

Diketahui nilai F-statistik sejumlah 5.256224 dengan nilai p (prob. F-statistik) sejumlah $0.006085 < 0,05$. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwasanya variabel tidak terikat RK dan BD menimbulkan pengaruh signifikan dalam konteks simultan pada variabel KKD.

Hasil Uji T

Hasil uji t mengindikasikan bahwasanya nilai p-value untuk variabel RK adalah 0.1010, yang mana > 0.05 , mengindikasikan bahwasanya variabel RK tidak menimbulkan dampak signifikan pada variabel dependen. Di sisi lain, nilai p-value untuk variabel BD adalah 0.0066, yakni < 0.05 , menjadi indikasi bahwasanya variabel BD menimbulkan dampak signifikan pada variabel terikat.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama merumuskan bahwa rasio kemandirian menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan Pemda. Akan tetapi, berdasarkan hasil Uji t pada tabel 4.9 menunjukkan koefisien sejumlah 0.1010, yang mana di atas 0.05 yang mengartikan bahwasanya rasio kemandirian tidak menimbulkan pengaruh pada tumbuhnya perekonomian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya rasio kemandirian tidak mempunyai dampak yang signifikan pada kinerja keuangan Pemda. Kondisi ini mungkin disebabkan masih rendahnya rata-rata rasio kemandirian

pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0.262419 yang menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah masih tinggi.

Rendahnya rasio kemandirian juga disebabkan karena rendahnya PAD milik kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Maka, di antara beberapa strategi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembayaran pajak serta retribusi daerah agar realisasi PAD dapat optimal. Selain itu untuk mengoptimalkan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada melalui perbaikan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan personalia. Sementara ekstensifikasi dilaksanakan dengan menciptakan sejumlah sumber penghasilan baru dan menjalin kerjasama investasi (Nursafitra et al., 2019).

Temuan penelitian penulis sejalan dengan riset dari Hakiki et. al (2023) bahwa rasio kemandirian tidak menimbulkan pengaruh secara signifikan pada variabel dependen berupa kinerja keuangan Pemda. Akan tetapi studi dari Anyda dan Hermanto (2020) menunjukkan bahwasanya dalam konteks parsial rasio kemandirian memengaruhi secara signifikan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Diformulasikan sebagai hipotesis kedua, belanja daerah diasumsikan memiliki dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji-t, didapat nilai signifikansi sejumlah 0.0066, yang

berada di bawah ambang batas 0.05, sehingga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel belanja daerah pada kinerja keuangan Pemda. Analisis regresi data panel mengungkapkan bahwa koefisien belanja daerah bernilai 0.088905, yang menegaskan hubungan positif dan signifikan pada belanja daerah dan kinerja keuangan. Dengan demikian, peningkatan belanja daerah sebesar satu satuan diestimasikan akan mendorong peningkatan kinerja keuangan sejumlah 0.088905. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi belanja daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemda dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dan efektivitas kinerja keuangan Pemda. Hal ini mencerminkan bahwasanya penggunaan anggaran yang tepat untuk belanja daerah dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diterima oleh warga, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah utamanya tentang kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat berkaitan erat dengan peningkatan konstruksi infrastruktur serta penyediaan fasilitas umum dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya anggaran belanja daerah telah dikelola dengan baik untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian, pengeluaran daerah memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara teoritis, peningkatan belanja pemerintah daerah seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan

kualitas layanan tersebut pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai kinerja keuangan Pemda. Kinerja keuangan yang optimal mencerminkan stabilitas serta kapasitas fiskal yang lebih kuat, sehingga membuka peluang bagi peningkatan alokasi belanja daerah secara lebih signifikan (Awaliyah & Efendri, 2019).

Temuan dari penelitian ini linear dengan studi dari Permatasari dan Trisnaningsih (2022) bahwa hasil pengujian variabel pengelolaan belanja daerah menimbulkan pengaruh positif pada kinerja keuangan daerah. Akan tetapi, riset tersebut tidak sejalan dengan studi dari Mayanti et. al (2023) yang mengindikasikan bahwasanya belanja daerah menimbulkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh negatif ini disebabkan oleh dominasi belanja operasional yang lebih tinggi dibanding dengan belanja modal. Belanja modal seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Namun, ketika belanja rutin terlalu besar, hal ini dapat menurunkan kinerja keuangan daerah. Di sisi lain, belanja modal juga dapat berdampak negatif jika pengeluarannya di atas anggaran yang ditentukan dan tidak menghasilkan sumber pendapatan langsung untuk daerah, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada penurunan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Rasio Kemandirian dan Belanja Daerah secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai R-squared yang di dapat melalui pengujian sebesar 0.057599. Dapat di simpulkan pengaruh dari Rasio Kemandirian dan Belanja Daerah sebesar 5.7% yang dimana 93.3% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain.

menunjukkan bahwasanya model regresi yang dipergunakan tidak mampu menguraikan mayoritas variasi pada variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun variabel rasio kemandirian serta variabel belanja daerah menimbulkan pengaruh pada variabel terikat kinerja keuangan daerah, tetapi kontribusi mereka sangat terbatas. Hal ini menjadi indikasi adanya banyak aspek lain yang mungkin lebih signifikan dalam menentukan kinerja keuangan daerah, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, pengelolaan sumber daya, atau faktor eksternal lainnya. Rendahnya nilai R-squared ini memberikan beberapa implikasi penting untuk penelitian.

Dari hasil Nilai R-squared yang rendah, perlu dilakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut terhadap sejumlah variabel lain yang memiliki kemungkinan akan berpengaruh pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen seperti tingkat pendapatan asli daerah, pengelolaan anggaran, dan efisiensi operasional untuk mendapatkan representasi yang lebih komprehensif terkait dengan sejumlah faktor yang menimbulkan pengaruh pada kinerja keuangan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian atas pengaruh rasio kemandirian dan belanja daerah pada kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 hingga 2023 yang telah dilakukan melalui proses pengujian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian tidak menimbulkan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwasanya tinggi rendahnya rasio

kemandirian tidak berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rendahnya rasio kemandirian di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan rendahnya PAD. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu menaikkan tingkat PAD melalui upaya intensifikasi, seperti optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada, dan ekstensifikasi, seperti menciptakan sumber pendapatan baru.

2. Belanja daerah mengindikasikan pengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tingginya belanja daerah yang pengelolaannya efektif serta efisien, semakin baik pula kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan anggaran belanja yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung pembangunan infrastruktur serta menyediakan fasilitas publik guna menyejahterakan masyarakat.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, rendahnya nilai R-squared sebesar 0.057599 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan, yaitu Rasio Kemandirian dan Belanja Daerah, hanya mampu menjelaskan 5.7% variasi dalam Kinerja Keuangan Daerah, sementara 93.3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model. Lebih lanjut, dari dua hipotesis yang diajukan, hanya satu yang terbukti, yaitu Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Sementara itu, Rasio Kemandirian tidak menunjukkan

pengaruh yang signifikan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel tersebut, khususnya Rasio Kemandirian, terhadap Kinerja Keuangan Daerah sangat terbatas, dan mengisyaratkan adanya faktor-faktor lain yang mungkin lebih signifikan, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, pengelolaan sumber daya, atau faktor eksternal lainnya

Saran

Dari hasil Nilai R-squared yang rendah, perlu dilakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut terhadap sejumlah variabel lain yang memiliki kemungkinan akan berpengaruh pada variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen seperti tingkat pendapatan asli daerah, pengelolaan anggaran, dan efisiensi operasional untuk mendapatkan representasi yang lebih komprehensif terkait dengan sejumlah faktor yang menimbulkan pengaruh pada kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, V. R., Nilasari, Y., Pertiwi, T. P., Ekonomi, F., Nahdlatul, U., & Cirebon, U. (2024). *Analisis Rasio Efektivitas , Rasio Efisiensi , Dan Rasio Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan. 1*(1), 1–10.
- Angin, P., Natalian, E., & Bharata, R. (2023). Analisis rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU), 1* (3)(3), 173–183. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/1657/1336>
- Anyda, N. S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9*(10), 1–20. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi, 7*(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3*(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Aryani, H. F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 2*(1), 147–156. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i1.508>
- Awaliyah, S. R., & Efendri. (2019). Pengaruh Belanja Daerah, Pajak Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi. *Jurnal Akuntansi Universitas Trilogi, 3*(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/i>

- ndex.php/akt/article/download/1651/1274
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Cindy Nabilawaty, R., & Melani Hutajulu, D. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020 Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*. VI(April), 117–127. <http://e-jurnal.ummy-solok.ac.id/ojs/index.php/jusie/JUSIE>
- Dauhan, J. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. C. (2020). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 55–61.
- Dewi, A. C. K., & Kuswati, R. (2022). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Business and Economic Conference in Utilization of Modern Technology*, 426–438. <https://journal.unimma.ac.id>
- Firmansyah, A. (2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Dan Ukuran Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 6(1), 1–13. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Author. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 56–78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Hakiki, L. (2018). *Determinan Perilaku Kepatuhan Pajak pada Profesi Dokter*. 3, 42–58. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2023). PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KE. *JurnalGanec Swara*, 18(1), 41–50. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kharislam, D. D., Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2022). PENGARUH PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Indomaret Ruko Garuda Mas). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Kumayas, F., Kumenaung, G. A., & Siwu, H. F. D. (2024). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP

- KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA. *Berkala Efisiensi Ilmiah*, 24(4), 72–89.
- Kusuma, A. R. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 403–420.
- Lestari, J. S., Farida, U., & Chamidah, S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerjaterhadap Prestasi Kerja Guru. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 38–55. <https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2388>
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Maswar, M. (2017). Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 273–292. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54>
- Mayanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023). Pengaruh Kemandirian , Efektivitas PAD dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota di Aceh. 2(2), 31–38.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Characteristics, Regional Influence, BPK Government, Performance Audit, On Government, Finance. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nursafitra, M., Nursadik, M., & Yunus, M. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37–48. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pramudita, D. T., Woestho, C., & Kurniawan, D. (2023). Analisis Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap Pertumbuhan Laba (Studi pada Perusahaan Health Care Tahun 2014-2022). *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(1), 01–15. <https://doi.org/10.62335/dqv4ft24>
- Prasetyo, T. D., Genius, A., Utomo, I. B., Victoria, E., Azizah, N. R., & Meilana, B. C. (2021). Kajian Fiskalregional Tahun 2021. *Kementrian Keuangan DJPD, triwulan I*, 17.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamalang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi,*

- Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Roza Gustika, Widia Firta, Citra Suci Mantaun, Muhammad Fahrozi, & Dedek Kurnia Sandi. (2022). Pengaruh Non Performing Loan (Npl) Dan Net Interest Margin (Nim) Terhadap Capital Adequacy Ratio (Car) Pada Bank Swasta Yang Go Public Di Indonesia Periode (2016- 2018). *Journal of Social and Economics Research*, 3(2), 123–138. <https://doi.org/10.54783/jsr.v3i2.26>
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel pada Ketimpangan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 241–253. <http://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/SNMSA/article/view/860>
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Wealth, Leverage Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 1–9.
- Santoso, R. T., Syukri, M., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–21.
- Shanti, Y. K. (2022). Analisis Determinan Fraudulent Financial Statement Melalui Pendekatan Fraud Triangle. *Jurnal Widya*, 3(2), 222–246.
- Surgawati, I. (2021). *ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA MENJELANG*. 2(November).
- Syah, S. R., Sufardi, S., & Marlina, N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja terhadap Tingkat Laba pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(2), 58–75. <https://doi.org/10.62335/89vwjt47>
- Yusmaniarti, Setiorini, H., & Pitaloka, L. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(4), 406–418.
- Amalia, V. R., Nilasari, Y., Pertiwi, T. P., Ekonomi, F., Nahdlatul, U., & Cirebon, U. (2024). *Analisis Rasio Efektivitas , Rasio Efisiensi , Dan Rasio Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan*. 1(1), 1–10.
- Angin, P., Natalian, E., & Bharata, R. (2023). Analisis rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1 (3)(3), 173–183. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/1657/1336>
- Anyda, N. S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–20.

- <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Aryani, H. F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 147–156. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i1.508>
- Awaliyah, S. R., & Efendri. (2019). Pengaruh Belanja Daerah, Pajak Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi. *Jurnal Akuntansi Universitas Trilogi*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Cindy Nabilawaty, R., & Melani Hutajulu, D. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020 Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*. VI(April), 117–127. <http://e-jurnal.ummy-solok.ac.id/ojs/index.php/jusie/JUSIE>
- Dauhan, J. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. C. (2020). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 55–61.
- Dewi, A. C. K., & Kuswati, R. (2022). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Business and Economic Conference in Utilization of Modern Technology*, 426–438. <https://journal.unimma.ac.id>
- Firmansyah, A. (2023). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Dan Ukuran Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 6(1), 1–13. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Author. *Jurnal Ekonomi Dan*

- Keuangan Publik*, 10(1), 56–78.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Hakiki, L. (2018). *Determinan Perilaku Kepatuhan Pajak pada Profesi Dokter*. 3, 42–58.
<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2023). PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KE. *JurnalGanec Swara*, 18(1), 41–50.
<https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kharislam, D. D., Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2022). PENGARUH PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Indomaret Ruko Garuda Mas). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Kumayas, F., Kumenaung, G. A., & Siwu, H. F. D. (2024). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA. *Berkala Efisiensi Ilmiah*, 24(4), 72–89.
- Kusuma, A. R. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 403–420.
- Lestari, J. S., Farida, U., & Chamidah, S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerjaterhadap Prestasi Kerja Guru. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 38–55.
<https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2388>
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20.
<https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Maswar, M. (2017). Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 273–292.
<https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54>
- Mayanti, F., Rizky, F., & Ariansyah, R. (2023). *Pengaruh Kemandirian , Efektivitas PAD dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota di Aceh*. 2(2), 31–38.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Characteristics, Regional Influence, BPK Government, Performance Audit, On

- Government, Finance. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nursafitra, M., Nursadik, M., & Yunus, M. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37–48. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Pramudita, D. T., Woestho, C., & Kurniawan, D. (2023). Analisis Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap Pertumbuhan Laba (Studi pada Perusahaan Health Care Tahun 2014-2022). *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(1), 01–15. <https://doi.org/10.62335/dqv4ft24>
- Prasetyo, T. D., Genius, A., Utomo, I. B., Victoria, E., Azizah, N. R., & Meilana, B. C. (2021). Kajian Fiskal regional Tahun 2021. *Kementrian Keuangan DJPD, triwulan I*, 17.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Roza Gustika, Widia Firta, Citra Suci Mantauv, Muhammad Fahrozi, & Dedek Kurnia Sandi. (2022). Pengaruh Non Performing Loan (Npl) Dan Net Interest Margin (Nim) Terhadap Capital Adequacy Ratio (Car) Pada Bank Swasta Yang Go Public Di Indonesia Periode (2016- 2018). *Journal of Social and Economics Research*, 3(2), 123–138. <https://doi.org/10.54783/jser.v3i2.26>
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel pada Ketimpangan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 241–253. <http://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/SNMSA/article/view/860>
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Wealth, Leverage Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 1–9.
- Santoso, R. T., Syukri, M., & Hasanah, N. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–21.
- Shanti, Y. K. (2022). Analisis Determinan Fraudulent Financial Statement Melalui Pendekatan Fraud Triangle. *Jurnal Widya*, 3(2), 222–246.
- Surgawati, I. (2021). *ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PADA*

*KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA MENJELANG.*
2(November).

Syah, S. R., Sufardi, S., & Marlina, N.
(2024). Pengaruh Pengelolaan
Modal Kerja terhadap Tingkat
Laba pada PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk. *AKSIOMA : Jurnal
Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(2),
58–75.

<https://doi.org/10.62335/89vwjt47>

Yusmaniarti, Setiorini, H., & Pitaloka, L.
(2019). Pengaruh Good Corporate
Governance, Profitabilitas, Dan
Leverage Terhadap Nilai
Perusahaan Pada Perusahaan
Property Dan Real Estate
Indonesia. *Jurnal Ilmiah
Akuntansi*, 3(4), 406–418.